

PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps)

Oleh

Made Arsia Luna Tantra, NIM. 2214101023

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan upaya diversi oleh hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan tentang diversi dan sistem peradilan pidana anak serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan diversi. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Data diproses melalui tahapan reduksi data dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps, upaya diversi tidak dapat diterapkan karena korban merupakan warga negara asing yang telah kembali ke negaranya. Ketiadaan regulasi mengenai pelaksanaan musyawarah diversi melalui sarana telekonferensi menjadi kendala utama dalam penerapan diversi pada perkara dengan korban lintas negara. (2) Anak telah memperoleh perlindungan khusus melalui penanganan oleh hakim anak, komunikasi yang tidak mengintimidasi, persidangan tertutup, pendampingan orang tua, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan, serta anonimisasi identitas anak. Namun, tidak dianonimkannya identitas ibu dalam salinan putusan berpotensi mengungkap jati diri anak, sehingga perlindungan khusus belum terlaksana secara optimal.

Kata Kunci: Diversi, Anak Pelaku Tindak Pidana, Pengadilan Negeri Denpasar.

**IMPLEMENTATION OF DIVERSION EFFORTS FOR JUVENILE
OFFENDERS IN THEFT CASES AT THE DENPASAR DISTRICT COURT
(A STUDY OF DECISION NUMBER 9/PID.SUS ANAK/2025/PN DPS)**

By

Made Arsia Luna Tantra, NIM. 2214101023

Law Studies Program

ABSTRACT

This research aims (1) to identify and analyze the implementation of diversion by judges in Decision Number 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps based on the PERMA No 4 Tahun 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System, and (2) to examine and analyze the forms of special protection provided to children in conflict with the law in Decision Number 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps at the Denpasar District Court. This study employs an empirical legal research method with a descriptive approach. Primary data were obtained through observation and interviews, while secondary data were collected from laws and regulations related to the diversion and juvenile criminal justice system and also documents related to diversion. Data collection techniques included document studies, observations, and interviews. The sampling techniques applied was Non-Probability using Purposive Sampling. The data were processed through data reduction and analyzed descriptively and qualitatively.

The findings show that (1) in Decision Number 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps, diversion could not be implemented because the victim was a foreign national who had returned to their home country. The absence of a regulation governing the implementation of diversion meetings via teleconference poses a major obstacle to applying diversion in cases involving cross-border victims. (2) The child received special protection through handling by a juvenile judge, non-intimidating communication, closed court hearings, assistance from parents, legal counsel, and community counselors, as well as the anonymization of the child's identity. However, the failure to anonymize the mother's identity in the court decision potentially reveals the child's identity, indicating that special protection has not been fully implemented.

Keywords: *Diversion, Children in Conflict with the Law, Denpasar District Court.*